

BAB I

TIDAK BOLEH
DI FOTO COPY

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu—siapapun dia—memerlukan identitas untuk memberi rasa aman melalui *sense of belonging* dengan sekelompok orang yang sama. Identitas bukan merupakan proses yang terberi (*given*) dan statis. Sebaliknya, identitas dapat dimulai dari permulaan hidup setiap individu dan terus menerus mengalami pergumulan. Jadi individu maupun kelompok akan terus menerus mengidentifikasi diri, mencari diri, dan membentuk identitasnya, baik dalam konteks pribadi maupun kelompok budaya. Identitas sangatlah vital, keberadaanya menjadi sesuatu yang hakiki bagi setiap individu, termasuk bagi etnis Tionghoa.¹

Keberadaan warga keturunan Tionghoa di Indonesia menjadi bentang potret pergulatan pencarian identitas yang berlangsung sejak lama. Sebagai etnis minoritas, mereka sangat rentan terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan identitasnya, baik sosial-politik, maupun persoalan yang lain. pasalnya, berbagai kebijakan seringkali memposisikan identitas etnis Tionghoa dalam ketidakberuntungan. Di tengah kepuangan kultur dominan yang kokoh, acapkali ia harus mengikis dan menyurutkan identitas aslinya. Meskipun selama ratusan tahun warga Tionghoa telah menetap di Indonesia, dan garis keturunan mereka pun tidak lagi bisa dikatakan lebih Tionghoa, mereka seringkali menghadapi *disilusi* (kekecewaan) dan *displacement* (keterasingan). Warga Tionghoa seringkali —untuk tidak dikatakan selalu— diceritakan (di-*image*-kan) sebagai identitas pendatang, non-pribumi, identitas homogen dan eksklusif. Tentu saja, kenyataan ini menjadi problematika identitas yang sangat kompleks.

Pergulatan etnis Tionghoa tidak hanya berhenti pada tataran identitas kebangsaan, tetapi juga pada konteks sosiologis dan antropologis pada saat mereka harus berbaur dengan struktur dan budaya lokal pada masyarakat di sekitarnya. Upaya pergulatan itu menumbuhkan heterogenitas di kalangan Tionghoa yang

¹ Tjung Ju Lan, *Susahnya Jadi Orang Cina, Ke-Cina-an sebagai Konstruksi Sosial*, dalam I. Wibowo (Ed.), *Harga Yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, 2001, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 171

selama ini dipandang homogen, baku dan *ajeg*. Padahal, identitas Tionghoa sangatlah rumit, kompleks dan *bhinneka*. Pergulatan ini semakin kuat tatkala negara ikut berperan menjalankan politik identitas untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya.

Bila kita telusuri, perkembangan kelompok etnis Tionghoa sejak tahun 1966 – 1967 kita bisa melihat, bahwa ada beberapa hal yang membawa mereka ke perkembangan terakhir seperti yang dinukilkan oleh Alexander Irwan.² Pada masa-masa sebelum Orde Baru, identitas “Tionghoa” mengacu pada yang berdarah “Tiongkok”. Pada konteks ini, identitas ke-Tionghoa-an dilihat hanya dari sisi biologis. Pertanyaannya kemudian adalah apakah identitas ke-Tionghoa-an layak disematkan kepada mereka, sementara banyak di antara mereka yang tidak lagi menggunakan bahasa Tiongkok dan memegang tradisi serta adat-istiadat Tiongkok.

Agaknya, menjawab pertanyaan ini kita terbantu dengan dua istilah yang cukup populer, yakni “Tionghoa Totok” dan “Tionghoa Peranakan”. Tionghoa Totok adalah warga Tionghoa yang masih memegang kokoh tradisi dan adat istiadat leluhur, termasuk bahasa Tiongkok. Sementara Tionghoa Peranakan adalah mereka yang tidak lagi menggunakan dan mempertahankan kebudayaannya secara saklek, sehingga mereka disebut berkurang ke-Tionghoa-annya.

Pada awal Pemerintah Orde Baru sampai sekitar tahun 1970-an pandangan ini berlanjut, tidak ada keraguan bagi siapapun, bahwa mereka yang berdarah “Tionghoa” adalah “orang Tiongkok” dan sedikit banyak juga berbudaya Tiongkok. Pada tahun 1980-an, kenyataan sosiologis dan kultural menunjukkan hal yang

² Tjung Ju Lan, *Op. Cit.*, hal. 180. Sebelumnya, Generasi umur 70-an (lahir tahun 1930-an) adalah generasi etnis Tionghoa yang tidak pernah meragukan ke-Tionghoa-an mereka. Mereka menganggap diri mereka “Tionghoa” dan memelihara ke-Tionghoa-an tersebut dengan mempertahankan kemahiran bahasa Tiongkok mereka—biasanya masuk dalam tuturan seperti Hokkian, Hakka, dan Teociu—serta tradisi dan adat-istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, termasuk pemujaan leluhur. Generasi umur 60-an (lahir tahun 1940-an) pun cenderung mempunyai identitas ke-Tionghoa-an yang kuat, karena kebanyakan dari mereka bicara bilingual. Identitas ke-Tionghoa-an mereka terpelihara melalui kemahiran mereka berbahasa Tiongkok (atau kelompok tuturan lainnya). Generasi umur 50-an (lahir tahun 1950-an) sudah mulai kehilangan kemahiran berbahasa Tiongkok, ke-Tionghoa-an mereka lebih ditentukan oleh lingkungan sosial mereka. Mereka yang bergaul diantara “Tionghoa Totok” cenderung merasa lebih “Tionghoa” ketimbang mereka yang bergaul diantara “Tionghoa Peranakan” dan penduduk lokal. Yang terakhir ini, seperti telah disebutkan diatas, cenderung memakai ke-Tionghoa-an mereka hanya bila dibutuhkan atau pada waktu terpaksa saja. Generasi umur 40-an (lahir tahun 1960-an) dan umur 30-an (lahir tahun 1970-an) sudah jarang yang mahir berbahasa Tiongkok (atau kelompok tuturan lainnya) dan sebagian besar dari mereka telah lepas dari ikatan tradisi dan adat-istiadat leluhur karena menjadi Kristen, Katolik atau Islam, disamping perkawinan campur dengan laki-laki atau perempuan penduduk lokal, oleh karena itu, ke-Tionghoa-an bagi mereka umumnya hanyalah akibat hubungan darah dengan generasi pendahulu mereka. Mereka cenderung melihat diri mereka sebagai “golongan menengah yang profesional” daripada sebagai “keturunan Tionghoa”.

berbeda, dimana telah menghasilkan suatu generasi muda etnis Tionghoa yang cenderung kehilangan kemahiran berbahasa Tiongkok (atau kelompok tuturan lainnya) dan pemahaman tentang tradisi dan adat-istiadat Tiongkok, walaupun ada sebagian yang menjadi *bilingual*.³

Sementara pada dekade 1990-an, kita menyaksikan munculnya generasi muda etnis Tionghoa, khususnya kelas menengah ke atas, yang hampir seluruhnya berpendidikan Barat dan cenderung berorientasi karier. Mereka tidak lagi bisa melihat diri mereka sebagai pedagang atau pemilik toko seperti generasi pendahulu mereka. Terdapat kecenderungan mereka melihat dirinya sebagai orang-orang yang mengutamakan profesionalisme. Pengaruh pendidikan Barat dan profesionalisme pada generasi muda ini berdampak besar pada cara pandang mereka tentang identitas ke-Tionghoa-an yang mereka melekat pada mereka. Ada yang menganggap ke-Tionghoa-an sebagai aset, khususnya ketika mereka melakukan transaksi bisnis dengan pengusaha etnis Tionghoa di luar negeri, walaupun mereka sudah kehilangan kemahiran berbahasa Tiongkok (atau kelompok tuturan lainnya). Di sini, ke-Tionghoa-an dilihat sebagai suatu ikatan persaudaraan se-etnis yang mengatasi kesenjangan pengkategorian hubungan biologis dan ikatan budaya yang sudah semakin kabur, karena yang bersangkutan mungkin telah bergenerasi-tinggal di Indonesia dan menikah dengan penduduk lokal.

Sementara sebagian lain menganggap bahwa ke-Tionghoa-an sebagai suatu beban akibat trauma Peristiwa G 30 S/PKI,⁴ mereka menyembunyikan identitas ke-Tionghoa-annya dan lebih memposisikan diri sebagai orang Indonesia. Beragam pandangan terhadap identitas ke-Tionghoa-an ini terlihat signifikansinya setelah terjadinya peristiwa tragis Mei 1998.⁵ Berbagai reaksi yang muncul di kalangan

³ *Ibid.*

⁴ Peristiwa yang menewaskan tujuh petinggi TNI AD (yang kemudian disebut dengan Pahlawan Revolusi) dalam waktu semalam, dimana dalang dari tragedi tersebut dialamatkan pada Partai Komunis Cina yang konon turut mendukung gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI), atas peristiwa itu, semua orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia di-*gebyah-uyah* terlibat (setidaknya mendukung) PKI, akibatnya dikemudian hari muncul kebijakan-kebijakan untuk mengeluarkan orang-orang keturunan Tionghoa dari semua kedudukan politis dan militer serta dampak-dampak lainnya ditengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Lebih lanjut baca. Wang Gungwu, *Orang Etnis Cina Mencari Sejarah*, dalam I. Wibowo (Ed.), *Harga Yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, 2001, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 1 – 34.

⁵ Kerusuhan 13 – 15 Mei 1998 di Jakarta dan kota-kota besar lainnya seperti Medan, Palembang, Lampung, Solo, Surabaya, bahkan kota yang lebih kecil (Pekalongan dan Kebumen), merupakan malapetaka terbesar yang dialami bangsa Indonesia, khususnya bagi orang-orang keturunan Tionghoa. Apakah secara langsung kerusuhan 11 tahun lalu itu diarahkan pada orang-orang keturunan Tionghoa, memang tidak begitu jelas. Akan tetapi bahwa mereka menjadi korban kerusuhan itu tidak bisa dipungkiri, karena penyerangan awal kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan (bahkan disertai

etnis Tionghoa terhadap peristiwa tersebut menggambarkan sikap kelompok-kelompok etnis Tionghoa yang berkaitan dengan identitas mereka.

Akibat trauma kerusuhan tersebut, maka mereka kemudian mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama Indonesia. Misalnya, Liem Sioe Liong mengganti namanya menjadi Soedono Salim, Liem Tun Hien menjadi Harjanto Halim, Mak Kuo Bing menjadi Maksoem Pienarto, Yoe Hong Wie menjadi Robert Budi Wibowo, dan Tan le Ling menjadi Tanto Hermawan yang khas Indonesia.

Pergantian nama ini merupakan salah satu upaya agar warga Tionghoa bisa diterima sebagaimana etnis lain di Indonesia. Pengakuan tentang keberadaan identitas semacam ini penting artinya bagi warga etnis Tionghoa, dan bagi interaksi sosial individu para warga dengan sesama etnis Tionghoa maupun dengan mereka yang non-Tionghoa. Kendati demikian, pengakuan akan identitas tidak berarti persoalan telah usai, karena banyak warga Tionghoa yang dipertanyakan loyalitas mereka. Mereka dianggap tidak memiliki loyalitas terhadap negara Indonesia. Pilihan menjadi warga negara Indonesia dianggap hanya untuk mencari kemudahan atau bersifat "aji mumpung". Padahal loyalitas kelompok-kelompok etnis selain Tionghoa tidak pernah dipermasalahkan.

Membicarakan identitas Tionghoa, maka wacana identitas tidak bisa sepenuhnya lepas dari masa lalu, dimana masa lalu telah terbungkus rapi di dalam ruang arketip atau memori kolektif para pemilik identitas tersebut. Tetapi juga, identitas menyangkut kehadiran ataupun penghidupan kembali (*revitalisasi*) suatu identitas yang disandarkan pada budaya bersifat material di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.

Hal tersebut diperlukan tidak hanya untuk menunjukkan eksistensi identitas itu sendiri dan sekaligus untuk menjunjung tinggi nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, karena keragaman budaya merupakan seperangkat semangat untuk bersatu, berkolaborasi, dan beraksi demi bumi pertiwi. Atas nama kebangsaan yang menghargai sejarah perjalanan salah satu entitas bangsa-nya, maka identitas Tionghoa seperti misalnya kelenteng-kelenteng tua dengan segenap festival kerakyatan tahunan-nya, rumah tua beratap khas, seni tari, seni musik, seni kriya, seni patung, seni kaligrafi, arsitektur, kesusastraan, dan hasil-hasil kuliner yang

pemeriksaan) di Jakarta dimulai dengan perusakan toko-toko dan rumah-rumah milik orang-orang keturunan Tionghoa. Lebih lanjut baca: Rene L. Pattiradjawane, Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Cina di Indonesia, dalam I. Wibowo (Ed.), *Harga Yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, 2001, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 213 – 252.

dihadirkan kembali di kawasan pemukiman Tionghoa atau Pecinan, adalah kewajaran di tengah masyarakat yang multikultural.

Rekam-jejak budaya identitas Tionghoa di masa lampau ditampilkan kembali di tempat “asli”-nya, yakni di Pecinan untuk kepentingan kebangsaan (disamping untuk *klängenan* generasi yang mengalaminya dan untuk bahan pembelajaran bagi generasi sekarang dari etnis Tionghoa ataupun lintas-etnis lainnya).⁶ Penampilan kembali pada tempat asli-nya merupakan upaya pemeliharaan dan pengembangan, atau juga bisa disebut sebagai konservasi identitas masa lampau. Usaha *konservasi* ini merupakan strategi menuju adanya sebuah proses *revitalisasi*.

Pada konteks ini, kita juga tidak bisa begitu saja melupakan peran Pemerintah Kota Semarang yang dalam perkembangannya menginginkan adanya revitalisasi Pecinan Semarang melalui SK.Walikota No.650.05/306 tertanggal 24 Desember 2003 perihal penataan kembali tiga kawasan, yaitu Kota Lama, Masjid Kauman Semarang (termasuk di dalamnya eks. aloon-aloon Kandjengan) dan Pecinan Semarang. Usaha pemerintah kota ini merupakan konsekuensi dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dimana pemerintah daerah diberi wewenang penuh untuk membuat kebijakan sendiri (yang saat itu) bertujuan mengatasi krisis perekonomian nasional secara mandiri bagi setiap daerah otonom. Ini berarti, pemerintah daerah bersama *stakeholder*-nya dituntut untuk jeli dan kreatif dalam mengoptimalkan setiap jengkal potensi berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya.

Kawasan Pecinan Semarang, sebagai salah satu kawasan pecinan yang potensial dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemerintah kota mengembangkan potensi daerahnya. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan dari kawasan Pecinan Semarang adalah potensi pariwisata budaya. Warga Tionghoa pun kemudian merespon niat Pemerintah Kota Semarang melalui paguyuban warga Tionghoa, yakni Kopi Semawis (Komunitas Pecinan Semarang untuk Pariwisata). Beberapa tahun belakangan, Kopi Semawis sangat aktif melakukan upaya revitalisasi kawasan Pecinan Semarang dengan berbagai langkah, baik ekonomi, budaya, literer, maupun politik.

⁶ *Ke-khas-an*, yakni usaha pemeliharaan “keaslian” suatu identitas dan warisan budaya. *Keterancam-an*, yakni usaha menjaga identitas dan warisan budaya dari ancaman kepunahan. *Kegunaan*, yakni usaha mempertahankan warisan budaya tersebut sebagai pembelajaran sejarah, riset, dan manfaat spiritual. (Biologi Konservasi, hal. 300-302)

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka agar penelitian ini fokus perlu kiranya dibuat rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah strategi Kopi Semawis dalam menghidupkan kembali kawasan Pecinan Semarang [identitas Pecinan] sebagai ikon pariwisata di Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

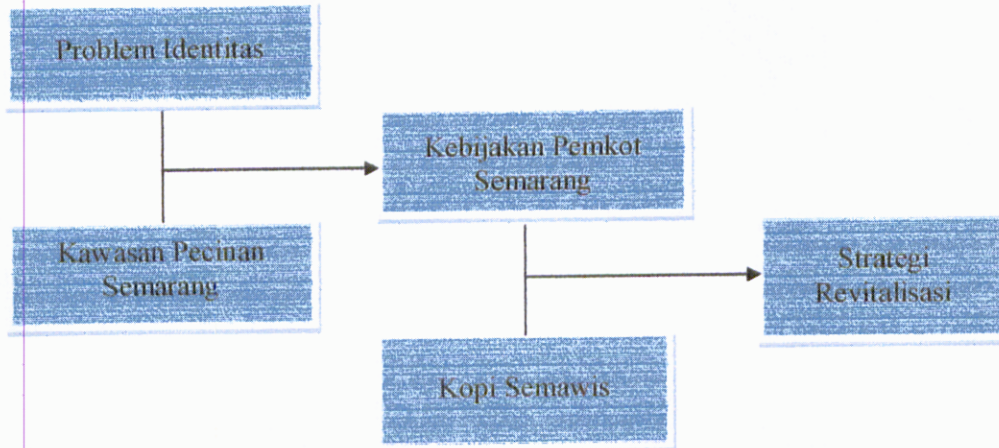
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai Strategi Kopi Semawis dalam menghidupkan kembali Kawasan Pecinan Semarang. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan strategi Kopi Semawis dalam menghidupkan kembali Kawasan Pecinan Semarang sebagai ikon pariwisata Kota Semarang.

Sedangkan manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yakni manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberi penjelasan tentang strategi Kopi Semawis dalam menghidupkan kawasan Pecinan Semarang. adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah menjadi sumber informasi bagi semua pihak terkait.

1.4 Kerangka Penelitian

Agar lebih mudah dipahami tentang alur penelitian ini, maka perlu kiranya dibuat kerangka penelitian. Kerangka penelitian tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut:

Diagram. 1
Kerangka Penelitian



Dari kerangka penelitian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa mula-mula penelitian ini berangkat dari asumsi tentang problem identitas. Identitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah identitas Pecinan Semarang yang tercermin dalam Kawasan Pecinan Semarang. Identitas kebudayaan Pecinan ini bisa berupa *culture heritage* atau warisan budaya, yakni peninggalan benda-benda fisik (*tangible*) dan non fisik (*intangible*) dari sekumpulan masyarakat yang diwarisi oleh generasi terdahulu, yang dipelihara saat ini dan diberikan sebagai manfaat untuk generasi masa depan. Meski apa yang dianggap warisan budaya dari satu generasi mungkin tidak sama atau “asli” seperti (yang akan) diterima oleh generasi berikutnya.

Pemerintah Kota Semarang sebagai aktor yang memiliki tugas mengembangkan segala potensi di daerahnya, termasuk segala potensi pariwisata merasa perlu mengeluarkan kebijakan berupa revitalisasi berbagai warisan budaya, termasuk identitas Pecinan Kota Semarang. Kopi Semawis (Komunitas Pecinan Semarang untuk Pariwisata) yang merupakan organisasi sosial kemasyarakatan warga pecinan sebagai *stake holders* juga turut serta terlibat. Bagi Kopi Semawis, identitas dan warisan budaya tersebut perlu dikonservasi atas dasar kekhasan, keterancaman, dan kegunaan sebagai upaya pemeliharaan dan pengembangan sesuai dengan bidang dan latar belakangnya, melalui berbagai strategi.

1.5 Kajian Teori

Sebagaimana telah disinggung pada uraian di pendahuluan bahwa warga Tionghoa dalam sejarah Indonesia telah mengalami pergulatan identitas di tengah percaturan identitas-identitas etnis lain di Indonesia. Oleh karenanya, problem identitas akan senantiasa menjadi titik berangkat bagaimana melihat eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia, termasuk di Kota Semarang.

Akan tetapi, membicarakan eksistensi identitas bukanlah persoalan mudah, apalagi ketika identitas dihadapkan pada persoalan “keaslian” dalam setiap identitas. Kesulitan ini muncul seiring dengan keyakinan bahwa identitas adalah suatu konstruksi sosial sehingga ia terus didefinisikan, tidak pernah selesai. Ia akan selalu “mengada” bersama ruang dan waktu yang lain, dengan makna yang lain, tetapi tanpa menghapus makna yang telah ada.

Lalu bagaimanakah ketika identitas dihadapkan pada ruang dan waktu yang baru yang bernama pariwisata? Memang, agak riskan ketika berbicara tentang kepemilikan “keaslian” identitas (pecinan) dihadapkan pada entitas lain berupa pariwisata. Bisa jadi konstruksi identitas tidak lagi sebagai “identitas” itu sendiri (asli), melainkan perpaduan antara kepentingan mempertahankan jatidiri dengan kepentingan pariwisata. Mungkin tidak begitu berlebihan jika diibaratkan dengan mempertemukan yang *sacral* dengan yang *profane*. Kepentingan pariwisata muncul juga bagian dari konstruksi sosial. Oleh Gewertz dan Errington, hal ini merupakan bagian dari model politik internasional yang wisatawan munculkan untuk membangun *image* yang diciptakan oleh orang lain dan mereka sendiri (Gewertz dan Errington 1991).⁷

Identitas warisan budaya Tionghoa di Kawasan Pecinan Semarang juga menjadi salah satu potensi pariwisata yang menarik. Kebudayaan Tionghoa tersebut bias dijadikan sebagai wisata budaya (*cultural tourism*). Pemerintah Kota Semarang, seiring dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, juga berupaya memanfaatkan kawasan Pecinan Semarang sebagai salah satu potensi wisata budaya. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya SK. Walikota No.650.05/306 tertanggal 24 Desember 2003 perihal penataan kembali tiga kawasan, yaitu Kota Lama, Masjid Kauman Semarang (termasuk di dalamnya eks. aloon-aloon Kandjengan) dan Pecinan Semarang.

⁷ Chris Rojek dan John Urry (Ed.), 2003, *Touring culture Transformational of travel and Theory*, chapter 8, London : Routledge : Taylor and Francis Group, hal 175.

Komodifikasi dan keaslian (*authenticity*) selalu merupakan topik yang muncul dalam setiap pembicaraan dampak pariwisata terhadap sosial budaya masyarakat setempat. Mac Naught (1982) mengatakan bahwa pariwisata telah menceraub masyarakat dari bentuk asli ekspresi budayanya, karena tuntutan wisatawan.⁸ Sebagaimana diungkapkan oleh (Eco 1986:149), bahwa untuk melihat orang-orang lokal seperti sekadar penerima pasif dari satu dunia eksternal yang melanggar sebuah keaslian. Dengan sombong wisatawan berpura-pura menegaskan penduduk lokal yang berperan sebagai obyek pandangan mereka sendiri.⁹

Sebagai antisipasinya, “*broker-broker*” kebudayaan, yaitu mereka yang bergerak dalam industri pariwisata “memaksa” masyarakat untuk mengubah pertunjukan tersebut, agar sesuai dengan keinginan wisatawan. Dengan demikian masyarakat akan kehilangan keaslian dan identitasnya, sebagai akibat kecenderungan masyarakat untuk meniru pola hidup wisatawan dengan kebudayaan yang dibawanya, yang dipandang lebih maju dan bernilai tinggi. Kerusakan nilai-nilai tradisional ini erat kaitannya dengan perkembangan *komersialisasi* dan *matrealisme* dalam hubungan anatar manusia, yang merupakan salah satu konsekuensi yang umum dari pariwisata. Nilai-nilai moral yang pada umumnya mendasari hubungan sosial berubah menjadi nilai ekonomi (Wood:1979, Dogan:1989).¹⁰

Seiring dengan meningkatnya dominasi nilai ekonomi, komoditas atas kebudayaan selalu terlihat menonjol di semua daerah wisata (Greenwood, 1978), dan warisan budaya telah berubah fungsi menjadi modal pariwisata (Picard, 1990). Tidak dapat disangkal lagi bahwa kesenian telah banyak mengalami perubahan, dan orientasi seniman atau budayawan bukan lagi semata-mata kepada seni/budaya yang religius, melainkan lebih banyak kepada orientasi ekonomi (komersial). Kesenian/kebudayaan sudah mengalami proses komoditisasi, dimana nilai seni dan budaya sudah diukur dengan uang (harga pasar).¹¹

Konsep ‘keaslian’ sangatlah problematik. Berbicara masalah keaslian, umumnya citra yang terbayangkan adalah adanya masyarakat yang dicirikan oleh keadannya yang “alami”, “primitif”, dan “eksotik”. Kenyataannya tidak ada suatu

⁸ Igede Pitana, 2005, *Sosiologi Pariwisata* Yogyakarta: Andy Offset, hal. 142.

⁹ Chris Rojek dan John Urry (Ed.), *Op. Cit.*

¹⁰ Igede Pitana, *Op. Cit.* hal 143.

¹¹ Igede Pitana, *op. cit.*, hal. 145

kebudayaan pun yang sepenuhnya statis, yang tidak berubah dalam denyut waktu. Semua masyarakat dan kebudayaannya selalu berubah, walaupun dengan laju perubahan yang berbeda.¹²

Ahli pariwisata Erik Cohen (1988) mengatakan bahwa "keaslian" adalah sesuatu yang "*negotiable*", karena keaslian adalah suatu konsep yang merupakan hasil dari konstruksi sosial, dan sangat kontekstual. Keaslian bukanlah suatu yang statis, karena wisatawan sendiri bukan lah konsumen yang pasif, yang juga turut menentukan "tingkat keaslian" suatu masyarakat atau hasil kebudayaan.

Keaslian kebudayaan sering dikaitkan dengan identitas masyarakat. Kiranya cukup beralasan kalau banyak orang dewasa ini mengkhawatirkan "keaslian kebudayaan" daerah tujuan wisata akan hilang. Namun dibalik itu perlu direnungkan kembali, bahwa pada dasarnya sangat sulit menemukan sesuatu yang "asli", dan ini tidak selalu berasosiasi dengan perkembangan pariwisata.

Dengan ataupun tanpa pariwisata, masyarakat memang selalu berubah. Kekhawatiran bahwa pariwisata akan menghilangkan "keaslian" dan "identitas" masyarakat nampaknya terlalu berlebihan. Pada tingkat yang lebih ekstrim, tidak berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwa "masyarakat asli" ataupun "kebudayaan asli" tidak pernah ada dalam sejarah kebudayaan, karena masyarakat dan kebudayaan selalu berubah dalam fungsi waktu.¹³

Salah satu hal yang kerap dibicarakan sehubungan dengan identitas diri ini adalah citra diri. Menurut Matindas,¹⁴ yang dimaksud "citra diri" adalah anggapan dan keyakinan seseorang tentang statusnya, haknya, kewajibannya, kemampuannya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dirinya. Citra diri merupakan jawaban atas pertanyaan "Siapa Saya?".

Citra diri merupakan salah satu butir dalam Sistem Nilai dan Asumsi (SINA) seseorang. SINA sendiri merupakan himpunan pandangan, pendapat, dugaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang, baik tentang dirinya sendiri, lingkungannya, maupun tentang hal-hal lain yang dijumpainya dalam hidupnya. Contoh SINA misalnya, keyakinan seseorang bahwa dirinya adalah orang yang

¹² Igede Pitana, *op. cit.*, hal. 145.

¹³ Igede Pitana, *op. cit.*, hal. 146.

¹⁴ R. Matindas, 1997, *Manajemen SDM*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

lebih pandai dari kebanyakan orang; keyakinan bahwa warna merah adalah warna yang terindah.¹⁵

Dalam kaitan ini, identitas yang dimaksud bukanlah “identitas” yang digambarkan oleh para “romantists” atau “primordialists” (Eickelman and Piscatory, 1990), yang mendefinisikan identitas sebagai sesuatu yang “fixed”, sebaliknya identitas dalam hal ini didefinisikan sebagai sesuatu yang “fluid”, yang terbuka terhadap proses “reflexivity, reevaluation, reinterpretation, atau reconstruction”. Secara singkat, mengikuti Lanfant at al. (1990: x), “identity is always in formulation, a constant site of struggle for those involved”.

Dalam melihat berbagai perubahan yang terjadi pada masyarakat, harus disadari bahwa perubahan adalah sesuatu yang *inevitable*, bahkan memang diharapkan oleh setiap masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Warren J. Samuel (1991:23), “the elements of culture are subject to continuous social reconstructions”. Secara ringkas, *culture identity is a product of active construction* (Friedman, 1993: 765).¹⁶

Eksistensi etnis Jawa dan Tionghoa, dikotomi pribumi-non-pribumi atau minoritas-mayoritas (selalu) menggiring pada persoalan identitas. Menjadi lumrah, kala yang dianggap non-pribumi/minoritas itu berusaha keras melakukan penguatan identitas demi mendapat pengakuan oleh yang lain (*the other atau liyan*) akan eksistensi mereka ditengah masyarakat yang multikultural melalui konservasi identitas dan warisan budaya.

Warisan atau pusaka (*heritage*) menurut Sarah MacDonald adalah “sesuatu tempat yang berharga sebagai identitas suatu tempat dan sebuah budaya yang ditunjukkan untuk pariwisata (*tourisme*)”.¹⁷ Sedangkan, *General Conference UNESCO* pada tahun 1972 mendefinisikan warisan (budaya) sebagai berikut, “Warisan dari masa lampau, yang kita nikmati saat ini dan akan kita teruskan kepada generasi yang akan datang”.¹⁸

¹⁵ Rizal Bachrun & Bobby H. *Krisis Identitas diri Pada Kelompok Minoritas Cina* dalam I. Wibowo (Ed.), 2001, *Harga yang harus dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 35.

¹⁶ Igede Pitana, *op. cit.*, hal 151

¹⁷ Sharon Macdonald, “A People’s Story: Heritage, Identity and Authenticity” dalam Chris Rojek and John Urry (ed.), 1997, *Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory*, London and New York: Routledge, hal. 155.

¹⁸ *Geger Warisan Budaya di Asia Tenggara Sebuah Konfrontasi Baru*, <http://svaltout.multiply.com/journal/item/81/>, 11 Agustus 2009.

Jadi *Culture Heritage* atau warisan budaya atau warisan adalah peninggalan benda-benda fisik (*tangible*) dan non fisik (*intangible*) dari sekumpulan masyarakat yang diwarisi dari generasi terdahulu, yang dipelihara saat ini dan diberikan sebagai manfaat untuk generasi masa depan. Meski apa yang dianggap warisan budaya dari satu generasi mungkin tidak sama atau tidak “asli” seperti yang diterima oleh generasi berikutnya.

Warisan budaya fisik termasuk bangunan-bangunan dan tempat-tempat bersejarah, monumen dan benda-benda peninggalan lainnya yang dianggap berharga pemeliharannya untuk masa depan. Seperti, benda-benda penting purbakala, bangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Warisan yang dipertahankan adalah yang unik, tidak dapat digantikan dengan tempat yang dipelihara secara bertanggungjawab pada masa sekarang, seperti hasil-hasil karya yang dikumpulkan di museum dan galeri.¹⁹

Warisan non fisik adalah adat sosial yang dipelihara selama waktu tertentu dalam sejarah, berupa cara maupun arti dari tingkah laku dalam masyarakat termasuk nilai-nilai sosial dan tradisi, adat dan kebiasaan, estetika dan kepercayaan spiritual, ekspresi artistik, bahasa, dan aspek aktivitas kemanusiaan yang lain. Adapun benda-benda non fisik dapat diterjemahkan kembali sebagai latar belakang sosio-ekonomi, politik, etnis, agama, dan nilai-nilai filosofis dari sekumpulan orang. Secara alami, warisan budaya non fisik lebih sulit dipelihara dari pada warisan fisik.²⁰

Warisan fisik dan non fisik etnis Tionghoa perlu dikonservasi sebagai upaya menghidupkan kembali kawasan Pecinan Semarang. Konservasi itu sendiri berasal dari kata *Conservation* yang terdiri atas kata “con” (*together*) dan “servare” (*keep/save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*), namun secara bijaksana (*wise use*). Ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Kedua jenis warisan budaya ini adalah ruang-ruang yang menyimpan identitas, dan identitas tersebut dalam kenyataannya bukan dikonservasi, tapi dimaknai secara baru,

¹⁹ *Cultural heritage*, <http://en.wikipedia.org/wiki/> 11 Agustus 2009.

²⁰ *Ibid.*

inilah *Revitalisasi*.²¹ Ungkapan tersebut di atas senada dengan apa yang dikemukakan oleh Nuryati berikut ini:

*“Tourism should be viewed as an asset or tool for the preservation of heritage... however, the concept of preservation should not be a “protectionist” one but rather it should be seen as an integrated concept for the revitalization and development of culture”.*²²

Pariwisata hendaknya dilihat sebagai suatu aset atau sarana untuk melestarikan warisan budaya...namun, konsep pelestarian ini janganlah bersifat “terlalu melindungi”, melainkan harus dipandang sebagai suatu konsep menyeluruh yang dipakai untuk menghidupkan kembali dan mengembangkan kebudayaan. Bagaimanapun juga yang harus dicatat adalah bahwa pariwisata kini ditawarkan sebagai satu-satunya juru selamat. Pariwisata itulah yang dianggap mampu menyelamatkan tradisi-tradisi yang kini diancam oleh evolusi masyarakat setempat/mayoritas. Yang terserang oleh kanan kiri oleh bermacam-macam pengaruh yang bersilangan satu sama lainnya. Seperti budaya dan ekonomi, pembangunan nasional, media, teknologi, dll.

Revitalisasi merupakan salah satu jenis pelestarian dengan mengadaptasikan bangunan lama yang sudah tidak praktis lagi untuk melayani penggunaan baru dan pada saat yang sama mempertahankan bentuk karakteristik orisinilnya. Revitalisasi dapat dilakukan tanpa atau dengan mengubah bentuk bangunan. Kadang memang tidak dapat dihindari bila ditilik dari analisis biaya manfaat tidak menguntungkan untuk dilestarikan, maka biarlah *facade* bangunannya saja yang dipertahankan agar pengamat bisa membayangkan wajah kota pada masa lalu (Budihardjo, 1991).²³

Upaya revitalisasi kawasan lama bukan hanya sekedar usaha melestarikan bangunan, tapi sudah juga merupakan usaha menghidupkan ekonomi kawasan yang mengalami kemunduran (Cohen, 1999). Upaya pelestarian pada saat ini merupakan usaha-usaha yang holistik yang bertujuan untuk memberikan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik berdasar kekuatan sumber daya lama, dan melakukan suntikan kehidupan yang menarik dan kreatif, berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dengan memperhitungkan nilai ekonomi. Manajemen

²¹ *Ibid*

²² Nuryanti, 1993, *Universal Tourism: Enriching or Degrading Culture?* Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, hal. 2

²³ *Cultural_heritage, Op. Cit*

merupakan alat untuk mencapai tujuan termasuk keterlibatan total masyarakat untuk mengelola sendiri/*people centered management* (Laretna, 2000).²⁴

Suntikan kegiatan baru yang memanfaatkan budaya dalam suatu kawasan harus terkait erat dengan sistem budaya dan lingkungan yang dibangun oleh masyarakat lokal. Dukungan untuk membangkitkan kebanggaan terhadap apa yang akan dikembangkan sangat penting. Begitu pula dalam pemilihan aktivitas yang akan dihidupkan kembali perlu penangan yang jeli. Kondisi ini menuntut pengelola yang mampu bekerja dekat dengan masyarakat lokal dan bersamaan dengan itu mampu mengembangkan jaringan dengan pihak luar yang sangat diperlukan (Boyer, 1994: 8).²⁵

Secara sederhana, revitalisasi berarti membuat vital kembali atau membuat hidup kembali.²⁶ Dimana secara terminologis, revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah hidup (vital) akan tetapi kemudian mengalami kemunduran (degradasi), agar terkondisi menjadi lingkup kehidupan yang produktif dan memberikan kontribusi positif pada kehidupan sosial-budaya, terutama kehidupan ekonomi kota. Upaya revitalisasi bisa dilakukan dalam skala mikro (pada sebuah jalan, bangunan) ataupun pada skala makro (mencakup kawasan yang lebih luas).²⁷ Kata "re-" berarti mengembalikan kembali pada keadaan yang telah terjadi, ada semacam ketidakrelaan menerima keadaan seperti ini, sehingga ingin kembali pada keadaan sebelum sekarang.

²⁴ *Cultural heritage, Op. Cit*

²⁵ *Cultural heritage, Op. Cit*

²⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily., 2000, *Kamus Inggris – Indonesia*, Cetakan XXIV, Jakarta: PT. Gramedia, hal. 631

²⁷ Harjanto K. Halim., "Chinese Heritage in Semarang: Cultural Revival and City Marketing" disajikan dalam *The 3rd International Conference: City Marketing, Urban Heritage and Identity*, Kudus-Semarang, 24-25 Agustus 2007, hal. 3